



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

EDISI XVII 20 DESEMBER 2010

PEMBEKALAN PRESIDEN RI KEPADA PESERTA PPRA XLV LEMHANNAS RI



Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan sekaligus sebagai pembekalan kepada para peserta PPRA XLV Lemhannas RI Tahun 2010 di Istana Negara

Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., pejabat Lemhannas RI dan peserta Pendidikan Program Reguler Angkatan (PPRA) XLV Lemhannas RI dalam rangka pembekalan Presiden RI kepada peserta PPRA XLV pada tanggal 13 Desember 2010 di Istana Negara.

Acara tersebut diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas RI kepada Presiden RI, secara umum menyampaikan bahwa peserta PPRA XLV telah menjalani kegiatan utama selama pendidikan seperti pembelajaran jarak jauh atau *e-Learning (Off campus)*, dan pembelajaran *On campus* meliputi, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Program pilihan ke Kementerian/Lembaga, Penulisan dan Penyajian Kertas Karya Perseorangan (Taskap) dan Seminar Nasional.

Pada kesempatan ini perwakilan peserta PPRA XLV memaparkan hasil seminar yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dengan tema **“Revitalisasi Pemerintah Daerah guna Pembangunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional”** dan naskah hasil seminar tersebut diserahkan kepada Presiden RI.

Dalam pembekalannya, Presiden RI menyampaikan



bahwa tema seminar yang telah dilaksanakan oleh PPRA XLV sangat relevan dengan kondisi reformasi saat ini, karena pemerintahan membutuhkan sistem yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional dalam rangka ketahanan nasional. Presiden RI juga menyampaikan kepada para peserta PPRA XLV bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan ini, mereka mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kebenaran dari langkah-langkah bersama menuju cita-cita nasional yang diharapkan dalam membangun bangsa Indonesia yang majemuk, dan mengarah kepada cita-cita nasional.

Di akhir sambutannya Presiden RI menyampaikan ucapan selamat kepada para peserta PPRA XLV yang telah mengikuti pendidikan dengan baik dan mengingatkan untuk harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| 1. Pembekalan Presiden RI kepada Peserta PPRA XLV Lemhannas RI.. | 1 |
| 2. Pembukaan Olah Sismennas PPRA XLV Lemhannas RI Tahun 2010.... | 2 |
| 3. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi BP Migas..... | 3 |
| 4. Kuliah Perdana Pascasarjana S2 dan S3 Lemhannas RI-UGM Batch IV.. | 4 |
| 5. Penandatanganan Kerjasama Lemhannas RI dengan Perpamsi, Parfi, dan Balegda..... | 4 |
| 6. Formulasi Desain Penataan Lembaga Non Struktural (LNS)..... | 5 |
| 7. Ulang Tahun ke-39 KORPRI..... | 5 |
| 8. Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia..... | 6 |
| 9. Percepatan Penyelesaian Sengketa batas Wilayah Antar Negara untuk Menjaga Kedaulatan NKRI dalam rangka Ketahanan Nasional..... | 7 |
| 10. Model Pembangunan Wilayah Perbatasan dari Perspektif Ketahanan Nasional..... | 8 |
| 11. Sertijab Eselon I, II, III, dan IV..... | 9 |
| 12. Seminar Nasional PPRA Lemhannas RI..... | 10 |
| 13. Upacara Penutupan PPRA XLV Lemhannas RI..... | 11 |
| 14. Pemotongan Hewan Kurban pada Idul Adha Tahun 1431 H..... | 12 |

PEMBUKAAN OLAH SISMENNAS PPRA XLV LEMHANNAS RI TAHUN 2010



Upacara Pembukaan Olah Sismennas yang dibuka oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdyia TNI DR. Rio Mendung Thalieb di Gd. Trigatra Lt. III Timur

Pembukaan acara Olah Sismennas PPRA XLV Tahun 2010 Lemhannas RI diselenggarakan pada tanggal 24 November 2010, di Gd. Trigatra Lt. III Timur dengan tema **“Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**. Acara dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H.

Olah Sistem Manajemen Nasional atau Olah Sismennas adalah metode belajar mengajar yang dikembangkan di Lemhannas dengan menggunakan simulasi. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta PPRA untuk lebih menghayati berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya di kelas maupun di lapangan dengan mencoba mempraktikkannya dalam bentuk simulasi kerja aparatur pemerintahan.

Globalisasi yang ditunjang dengan pesat oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas negara. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat pasca industri yang serba teknologis.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan.

Peningkatan kualitas SDM tidak dapat terlepas dari kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang merupakan duta bangsa dan sebagai salah satu penghasil devisa negara yang bahkan memperoleh predikat pahlawan devisa, haruslah memperoleh perhatian secara serius dan fokus oleh pemerintah dengan diberdayakan secara maksimal dengan diiringi peningkatan potensi-potensi SDM-nya agar dapat bersaing dan mendapat tempat di pasar tenaga kerja global.

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah perlu dilaksanakan reformasi birokrasi yang diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang dapat berperan sebagai dinamisator pembangunan dan mampu menciptakan iklim ekonomi sosial politik yang kondusif bagi lancarnya proses pembangunan.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa calon pimpinan tingkat nasional memiliki peranan yang sangat penting terutama terkait dengan integrasi bangsa pada setiap pengambil kebijakan di semua partner yang melakukan aliansi sehingga tujuan dapat tercapai dengan lebih efektif. Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta demokrasi, mereka diharapkan dapat merespon dinamika perkembangan ekonomi, sosial politik dalam negeri yang berkembang, serta dapat mengantisipasi dan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat dalam era globalisasi saat ini.



Briefing kepada para pelaku olah sismennas oleh Kawasdal di Gd. Pancagatra Lt. III Timur

PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI BP MIGAS DI LEMHANNAS RI

Pembukaan acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi manajemen BP Migas dan kontraktor kontrak kerjasama serta pejabat eselon II *Stakeholder* BP Migas Angkatan III tahun 2010 dibuka oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI, DR. Rio Mendung Thalieb di Gd. Trigatra Lt. III Barat Lemhannas RI pada tanggal 22 November 2010 dengan dihadiri oleh pejabat Lemhannas RI.

Nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai perekat kesatuan nasional Indonesia menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan dan menjaga keutuhan sebagai negara kesatuan republik Indonesia adalah salah satu kekuatan yang dipandang dan dikagumi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) diberikan kepercayaan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan sendiri sebagai bagian konsolidasi demokrasi pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memberikan pencerahan secara dialogis kepada para peserta dengan materi-materi



Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR memberikan ucapan selamat pada acara pembukaan Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan bagi Manajemen BP Migas



Upacara Pembukaan Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan bagi BP Migas Angkatan III tahun 2010 di Gd. Trigatra Lt. III Barat

yang telah menjadi bahan ajaran inti Lemhannas yang harus dipahami oleh setiap peserta sehingga para peserta akan mampu berpikir secara sistemik dan komprehensif integral untuk kepentingan nasional dalam kerangka NKRI, menumbuhkan sikap antisipatif, koperatif, sinergik terhadap kepentingan rakyat serta peduli terhadap potensi yang dimiliki daerah dan menumbuhkembangkan kemandirian daerah serta komitmen terhadap kelangsungan pembangunan nasional.

Terkait dengan tantangan bangsa ke depan dan untuk menghilangkan beberapa persepsi yang salah dari sebagian kelompok terhadap nilai-nilai kebangsaan, maka manajemen BP Migas dan kontraktor kontrak kerjasama serta stakeholder BP Migas Angkatan III Tahun 2010 ini menjadi sangat relevan dilaksanakan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI untuk memotivasi dan menambah rasa nasionalisme agar dapat semakin memperkokoh ketahanan nasional.

Di akhir sambutan Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh Wakil gubernur, mengharapkan kepada seluruh peserta kegiatan pemantapan agar dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap kegiatan yang sangat singkat dengan lebih cermat sesuai dengan alokasi waktu sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat secara optimal.

KULIAH PERDANA PASCA SARJANA S2 dan S3 LEMHANNAS RI-UGM BATCH IV

Program sekolah pascasarjana kerjasama Lemhannas RI-Universitas Gajah Mada (UGM) batch ke IV menyelenggarakan kuliah Perdananya di UGM, Yogyakarta selama 6 hari yang dibuka pada tanggal 30 November 2010 oleh Direktur SPS UGM Prof. DR. Hartono, DEA, DESS. Penyelenggaraan program sekolah pascasarjana tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mengembangkan wawasan bagi para mahasiswa yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara pada umumnya dan bagi Lemhannas pada khususnya.

Pada tanggal 1 Desember 2010, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memberikan kuliah umum di Ruang Seminar Lt. V, Gedung SPS UGM, dengan materi "**Keterpaduan Pendekatan Peacemaking Criminology and Warmaking Criminology dalam Menghadapi Tindak Pidana terhadap Keamanan**". Kuliah umum ini tidak

hanya dihadiri oleh mahasiswa program S2 dan S3 kerjasama Lemhannas dengan SPS UGM, tetapi juga dihadiri mahasiswa SPS UGM lainnya.



Gubernur Lemhannas RI memberikan kuliah umum dalam rangka kuliah perdana di Ruang Seminar Gd. Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

PENANDATANGANAN KERJASAMA LEMHANNAS RI DENGAN PERPAMSI, PARFI, DAN BALEGDA

Lemhannas RI mengadakan kerjasama dengan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi), dan Perhimpunan Badan Legislatif Daerah Indonesia (Balegda) pada 24 November 2010 di Gd. Astagatra Lt. III Barat.

Kerjasama Lemhannas RI dengan ketiga organisasi tersebut dalam rangka pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, kajian strategik, dan pemantapan nilai-

nilai kebangsaan. Kerjasama persahabatan antara kedua pihak ini adalah bentuk dari menjalankan visi Lemhannas RI dalam menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis, menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta membina dan mengembangkan hubungan kerjasama persahabatan antara para pihak secara sinergis dan komprehensif.

Penandatanganan kerjasama tersebut dari pihak Lemhannas RI diwakili oleh Sektama Lemhannas RI, DR Ardi Partadinata, Perpamsi diwakili oleh Ketua Umum Perpamsi, DR. Ir. H. Syaiful, DEA., dari Parfi diwakili oleh, Jenny Rachman, dan Balegda diwakili oleh Direktur Eksekutif Balegda, Ellena F. Manambe. Semua pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada para pihak tanpa mengurangi wewenang, tugas pokok, dan fungsi masing-masing yang mencakup hal-hal seperti **Pertama**, Pendidikan Penyiapan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional; **Kedua**, Pelaksanaan Kajian Strategik; **Ketiga**, Penyelenggaraan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.



Penandatanganan kerjasama antara Lemhannas RI dengan Perpamsi, Parfi, dan Balegda di Astagatra Lt. III Barat

FORMULASI DESAIN PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL (LNS)

Pertumbuhan pesat Lembaga Non Struktural (LNS) disamping kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan auditif, dan Kementerian serta lembaga non kementerian menimbulkan permasalahan karena keraguan terhadap efisiensi dan efektifitasnya. Seminar yang diselenggarakan oleh Sekretariat Negara pada tanggal 23 Nopember 2010 di Gd. Krida Bhakti merupakan salah satu ajang tukar pikiran dalam hal penataan kembali LNS yang terkait dengan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah.

Kegiatan seminar nasional yang dibuka oleh Deputi Bidang Hubungan kelembagaan Sekretariat Negara, Sumarwoto, S.H., M.P.A., dihadiri oleh 4 narasumber yang memaparkan materi yang terkait dengan LNS, yakni Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., dengan materi **"Penataan LNS di Indonesia dan Reformasi Birokrasi: Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara"**, Hakim Konstitusi RI, DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dengan materi **"Tinjauan LNS dari Sisi Konstitusional: Formulasi Penentuan Pijakan Hukum Penataan LNS di Indonesia"**, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Taufik Effendi, M.B.A., dengan materi paparan

"Efektifitas Kelembagaan dan Strategi Penataan LNS: Sebuah Tinjauan Adiministrasi Negara" dan Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., MS. dengan materi **"Dinamika Keberadaan LNS di Indonesia: Pengembangan Solusi Penataan"**.

Seminar tersebut diharapkan dapat menemukan sebuah formulasi desain tentang penataan LNS yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.



Gubernur Lemhannas RI memaparkan materi tentang "Penataan LNS di Indonesia dan Reformasi Birokrasi: Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara"

ULANG TAHUN KE-39 KORPRI

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. membacakan sambutan tertulis Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Penasehat Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada upacara ke-39 HUT KORPRI pada 29 November 2010 di Lapangan Apel Lemhannas RI. Dalam sambutan tersebut, Presiden RI menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap Keluarga Besar KORPRI yang telah memberikan dharma bhakti, dan pengabdianya dalam menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Tema pada peringatan HUT KORPRI kali ini yaitu **"Dengan Netralitas dan Profesionalitas KORPRI Mendukung Reformasi Birokrasi dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik"**. Anggota KORPRI ke depannya memiliki tugas menyukseskan reformasi gelombang kedua dan melalui reformasi gelombang kedua, KORPRI bertekad memajukan

kualitas penerapan demokrasi, meningkatkan upaya penegakan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.



Pengibaran Bendera Merah Putih pada Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-39 KORPRI di halaman tengah Lemhannas RI

TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA



Roundtable Discussion bidang Sosial Budaya yang dibuka Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH

Lemhannas RI melaksanakan acara *Roundtable Discussion* bidang sosial budaya tentang “*Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia untuk Menjaga Nilai-nilai Kerukunan Hidup Bermasyarakat dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional*” di Ruang Nusantara I, Gd. Trigatra Lemhannas RI pada tanggal 25 November 2010.

Organisasi kemasyarakatan, bila ditinjau dari aspek yuridis adalah merupakan refleksi dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Hal tersebut merupakan wahana strategis bagi upaya pencapaian keadilan sosial dan sekaligus merupakan hak dasar warga negara yang dilindungi UUD 1945.

Sedangkan ditinjau dari aspek sosiologis keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, kemitraan, keswadayaan dan partisipasi publik yang dibentuk secara sukarela dan bersifat nirlaba. Organisasi kemasyarakatan tersebut merupakan wadah penyaluran kepedulian dan kesadaran sosial dan politik masyarakat terhadap berbagai masalah aktual publik.

Dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir,

perkembangan organisasi kemasyarakatan sangat dinamis dan sulit diprediksi. Faktor eksternal yang didominasi lingkungan global dan regional akan banyak berpengaruh pada implementasi fungsi organisasi kemasyarakatan. Demikian pula dengan pengaruh faktor internal yaitu dinamika nasional turut mewarnai perubahan orientasi organisasi kemasyarakatan yang terkooptasi oleh kekuatan partai politik ataupun pihak-pihak yang sangat berkepentingan. Hal ini mengakibatkan terjadinya berbagai penyimpangan tujuan dan fungsi organisasi kemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan ketahanan nasional, penataan organisasi kemasyarakatan merupakan hal yang mendesak mengingat kemampuan yang harus dimiliki negara adalah dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan positif *ecological resilience* dan memprediksi secara relatif terukur apa yang akan terjadi di masa datang (*anticipatory resilience*).

Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya, mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan merupakan sarana pengintegrasikan dari fungsi adaptasi semua bidang kehidupan sehingga dalam segala kondisi bangsa Indonesia selalu dapat mempertahankan pola (*pattern of maintenance*) berupa nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan leluhur.

PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTAR NEGARA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN NKRI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dari sabang sampai merauke, dengan berlakunya *United Nation Convention on Law of The Sea* (UNCLOS) tahun 1982 pada tanggal 16 November 1994, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan posisi yang strategis dan memiliki sumber kekayaan alam melimpah. Secara geografis Indonesia berbatasan darat dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Dimana setiap Negara yang berbatasan mempunyai perbedaan kepentingan dan jati diri baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Kondisi ini merupakan potensi yang sangat rentan (*vulnerable*) terhadap potensi konflik khususnya masalah batas wilayah negara.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa semua negara yang berbatasan dengan Indonesia masih memiliki sengketa batas wilayah negara, sehingga kedaulatan wilayah NKRI dihadapkan pada suatu ancaman baik oleh *non state actors* maupun *state actors* (negara tetangga) terkait dengan sengketa batas wilayah antar negara. Oleh karena itu, Ditjian bid Hankam Dejianstrat Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* dengan tema **“Percepatan Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI Dalam Rangka Ketahanan Nasional”** pada tanggal 24 November 2010 di Ruang Nusantara I, Gd. Trigatra.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. dalam *keynote speech*-nya, menyampaikan bahwa bila kondisi tersebut tidak segera diselesaikan akan dapat mengganggu atau memperburuk hubungan antar negara (*bilateral*), bahkan akan dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara serta terganggunya ketahanan nasional termasuk keamanan regional yang lambat laun akan dapat menyebabkan negara-negara asing (negara yang bukan dalam sengketa) turut campur tangan dalam penyelesaiannya.

Gubernur mengharappkan saran dan pendapat ataupun masukan dari berbagai pihak dalam *Roundtable Discussion* tersebut menjadi pemikiran bersama untuk menemukan gagasan pemikiran yang strategis tentang percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah antar negara untuk menjaga kedaulatan NKRI dalam rangka ketahanan nasional. Meskipun penyelesaian sengketa batas wilayah antar negara baik perbatasan darat maupun laut sangat kompleks, namun bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, sengketa tersebut harus segera diselesaikan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip piagam PBB dan *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* serta instrumen-instrumen regional dan internasional lainnya.



Suasana Roundtable Discussion bidang Pertahanan dan Keamanan dengan tema “Percepatan Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI Dalam Rangka Ketahanan Nasional”

MODEL PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DARI PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL



Laporan Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Irjen Pol Drs. Mochammad Rasyid Ridho, SH, MH kepada Gubernur Lemhannas RI, Prof. Muladi, S.H. pada saat Roundtable Discussion bidang Internasional di ruang Nusantara I, Gd. Trigatra.

Ditjian bidang Internasional Dejianstrat Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* mengenai "**Model Pembangunan Wilayah Perbatasan Ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional**" yang dilaksanakan di Ruang Nusantara I, Gd. Trigatra tanggal 29 November 2010. *Roundtable Discussion* dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H.

Secara konstitusional, sistem hukum sangat berperan dalam menjamin terwujudnya kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Sedangkan secara yuridis Indonesia merupakan negara berdaulat yang telah diakui dunia internasional. Namun demikian, sampai sejauh ini Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan perbatasan yang rumit dan belum dapat diselesaikan.

Berbagai permasalahan perbatasan masih membayangi negeri ini, seperti belum disepakatinya beberapa segmen garis batas dengan negara tetangga baik darat maupun laut serta udara, belum adanya peraturan yang menjadi payung hukum yang memadai bagi penetapan batas wilayah negara secara menyeluruh, belum merata dan tertatanya tanda batas fisik negara maupun serta belum terkelolanya secara optimal pulau-pulau kecil yang terdepan.

Belum disepakatinya permasalahan perbatasan tersebut telah berdampak psikologis pada sebagian besar masyarakat perbatasan yang merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum sekalipun, sedangkan mereka dihadapkan dengan kondisi masyarakat negara tetangga yang terfasilitasi negaranya secara

lengkap (*prosperity imbalance*).

Pemerintah dalam upaya memajukan wilayah perbatasan juga telah menetapkan Undang-undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Prioritas Percepatan Pembangunan, Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan untuk semua, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Akan tetapi sampai sejauh ini perwujudan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa masih identik dengan "*wacana dan konsepsi*", yang sangat sulit untuk diwujudkan.

Gubernur Lemhannas RI, menyampaikan bahwa pemerintah harus menyelesaikan permasalahan wilayah perbatasan secara komprehensif, sebab permasalahan yang timbul tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi, tetapi juga politis, budaya dan keamanan dan juga bukan semata-mata isolasi fisik semata. Oleh karena itu model pembangunan selain bersifat komprehensif juga harus lintas disiplin serta lintas sektoral, dengan menempatkan kebijakan dan regulasi sebagai mekanisme pengintergrasi yang dapat mempersatukan fungsi-fungsi adaptasi ekonomi, pencapaian tujuan politik dan mempertahankan pola dalam bentuk ideologi dan konsensus dasar lainnya.

SERTIJAB PEJABAT ESELEON I, II, III, DAN IV LEMHANNAS RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, S.H. memimpin kegiatan serah terima jabatan, pelantikan serta pelepasan pejabat eselon I, II, III, dan IV Lemhannas RI pada tanggal 30 November 2010 di Ruang Nusantara Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa serah terima jabatan atau mutasi jabatan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang biasa terjadi di lingkungan birokrasi. Hal itu sebagai wujud dari proses pembinaan organisasi dan personel yang sangat erat kaitannya dan senantiasa dilakukan secara terencana serta berkelanjutan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Tidak lain dimaksudkan agar proses regenerasi yang sehat dapat berlangsung dengan baik, dan kinerja organisasi diharapkan dapat dicapai dengan lebih optimal.

Proses regenerasi perlu dilakukan agar di dalam suatu lembaga terjadi perubahan yang mengarah kepada pembaharuan komprehensif positif sejalan dengan tuntutan perkembangan lingkungan serta sasaran reformasi birokrasi.

Berlangsungnya perubahan pembaharuan dan peningkatan kinerja, sangat ditentukan oleh tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi dari para pejabat yang diberi amanah yang didukung oleh kemampuan dan kreativitas dalam menjalankan visi dan misi organisasi.

Gubernur Lemhannas RI berharap dan selalu mendorong agar dari waktu ke waktu dan dari satu pejabat berganti ke pejabat yang lainnya, Lemhannas RI akan semakin berkualitas, semakin maju,

dan semakin berprestasi diawaki oleh para personel yang memiliki kompetensi, integritas, dan kredibilitas yang mantap.

Pada kesempatan tersebut para pejabat yang melaksanakan sertijab dan dilantik adalah Brigjen TNI Endang Haerudin, S.T., M.M. beserta kawan-kawan 20 orang, dan pejabat yang dilepas yaitu Laksda TNI Adi Prabawa S.IP. M.M, sedangkan para pejabat yang memasuki masa purna bhakti 3 orang yaitu Mayjen TNI Wilono Djatiwiyono, S.IP., Marsdya TNI (Purn) Dikdik Amir Hasan, S.IP., MM., dan Kolonel Cpl Ir. Bachtiar Hasibuan, M.Eng, Mpm.

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 Gubernur Lemhannas RI memimpin kegiatan Sertijab dan pelantikan Pejabat eselon I, II, dan III Lemhannas RI di ruang yang sama adapun pejabat yang melaksanakan sertijab dan dilantik adalah Laksda TNI

Ignatius Dadiék Surarto, Marsma TNI Isnawan, S.E., Brigjen TNI (Mar) O. Sumantri Dipradja, S.IP., Kolonel Laut (T) Dicky Yuniarto, dan Kolonel Ckm (K) Dra. Rosmariana Sihombing, M.Si.

Gubernur juga menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, mengucapkan selamat bertugas. Jabatan baru yang di emban merupakan kepercayaan dan amanah, sekaligus kehormatan yang diberikan bangsa dan negara. Oleh karena itu beliau berharap, bahwa para pejabat yang baru saja dilantik mampu melaksanakan tugas sesuai jabatan masing-masing secara profesional dan proporsional, khususnya untuk para pejabat yang baru masuk bergabung dengan Lemhannas RI agar segera menyesuaikan diri dengan derap langkah kegiatan Lemhannas RI yang terus bergerak maju secara dinamis.



Pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Lemhannas RI kepada Brigjen TNI Endang Haerudin, S.T., M.M.

Seminar Nasional PPRA XLV Lemhannas RI

Seminar Nasional yang dilaksanakan PPRA XLV di Gd. Trigatra Lt. III Lemhannas RI pada tanggal 9 Desember 2010, mengangkat tema **“Revitalisasi Pemerintahan Daerah guna Percepatan Pembangunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional”**. Prof. DR. Muladi, S.H. sebagai Gubernur Lemhannas RI membuka seminar Nasional tersebut dan juga dihadiri 5 orang penanggap, antara lain Ketua DPD RI H. Irman Gusman, S.E., MM., Bupati Kutai H. Isran Noor, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Prof. DR. H. Djohermansyah, MA, Sekretaris Menteri Negara PAN Tasdik Kisananto, S.H., dan Dosen Besar UI Prof. DR. Benyamin Husein.

Seminar tersebut merupakan bentuk kepedulian Peserta PPRA XLV pada proses pembangunan nasional era otonomi daerah yang masih memerlukan akselerasi pembangunan yang antara lain disebabkan oleh, **pertama**, rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia dibanding dengan negara-negara di dunia; **kedua**, tingginya tingkat korupsi, berdasarkan hasil survey Masyarakat Transparansi Internasional; **ketiga**, tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat; **keempat**, pendapatan asli daerah belum mampu menutup anggaran belanja rutin daerah; **kelima**, banyaknya gugatan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilukada terutama dari pihak yang kalah, hal ini menimbulkan biaya sosial politik yang besar; **keenam**, belum dikelola secara maksimalnya potensi daerah; **ketujuh**, belum efektifnya kebijakan moratorium daerah dalam menghentikan niat *elite* daerah untuk memekarkan daerah.

Berdasar permasalahan tersebut, PPRA XLV Lemhannas RI 2010 mengusulkan beberapa pokok pikiran pemecahan persoalan, yaitu:

Pertama, Perlunya percepatan penyelesaian *grand design* pemerintahan daerah;

Kedua, Perlunya membangun komitmen aparatur daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang aspiratif;

Ketiga, Diperlukan peningkatan kualitas *checks* dan *balances* yang tidak terbatas pada institusi formal namun dibukanya akses masyarakat dalam mekanisme pengawasan dengan sistem dan prosedur yang disepakati dan harus tertuang pada perda;

Keempat, Pemerintah pusat harus membuat format yang mampu mendorong daerah untuk mengoptimalkan alokasi dana transfer guna kepentingan pembangunan di daerah yang berdampak pada pertumbuhan di daerah dan hasilnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga secara bertahap ketergantungan daerah terhadap transfer pusat semakin berkurang;

Kelima, Perlu dibangun media komunikasi politik, sehingga pimpinan tingkat nasional mampu melakukan komunikasi politik efektif, intensif dengan seluruh elemen masyarakat di daerah guna membangun kesadaran politik warga sehingga tercipta praktek-praktek *democratic civility*;

Keenam, Pemerintah pusat melalui kebijakan insentif fiskalnya harus mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada pengelolaan potensi daerah secara optimal dan menghindari pola pembangunan ekonomi yang tidak berdaya dukung di daerahnya sehingga berdaya saing tinggi.

Dalam konferensi pers sesaat setelah acara seminar, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memberikan pandangannya terkait dengan otonomi daerah, yaitu banyaknya pandangan setelah pemekaran daerah bahwa segala sesuatu akan lebih baik, padahal setelah pemekaran daerah masih banyak pembangunan yang perlu dilaksanakan. Gubernur juga melihat terjadinya pendekatan primordial yang berlebihan, bila hal ini dibiarkan dapat merusak pembangunan karakter bangsa yang plural, beliau juga mengharapkan pemimpin daerah direkrut tidak lagi hanya bergantung pada pendekatan calon, golongan, atau parpol, dan mau menghargai kebebasan media.



Seminar PPRA XLV Lemhannas RI yang berlangsung di Gd. Trigatra, Lemhannas RI

UPACARA PENUTUPAN PPRA XLV LEMHANNAS RI



Penanggalan tanda peserta oleh Gubernur Lemhannas sebagai tanda telah berakhirnya pendidikan PPRA XLV Tahun 2010 Lemhannas RI

Kamis, 16 Desember 2010 diselenggarakan upacara penutupan PPRA XLV Lemhannas RI di Gd. Trigatra Lt. III. Upacara tersebut dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., yang di hadiri oleh Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Ahli Profesional dan pejabat Lemhannas RI, juga dihadiri juga Menko Kesra, Agung Laksono, serta pejabat Kementerian/ Lembaga dan undangan lainnya.

Peserta Pendidikan Program Reguler Angkatan (PPRA) XLV telah mengikuti pendidikan selama 9,5 bulan dari 23 Maret -16 Desember 2010. Kurikulum yang telah dijalankan mengacu pada prinsip-prinsip perubahan yang dilaksanakan di Lemhannas RI sejak tahun 2006, yang antara lain meliputi prinsip efisiensi dan efektifitas, dengan mengembangkan pembelajaran jarak jauh (*long distance education*), prinsip keseimbangan antara *inward-outward looking*, prinsip *quality assurance* yang berupaya mensejajarkan Lemhannas RI dengan lembaga sejenis diluar negeri, prinsip adaptasi teknologi dengan memanfaatkan teknologi Telematika (Telekomunikasi, Multimedia, dan Komunikasi), prinsip *continuing education* yang memungkinkan alumni PPRA meneruskan studi pasca sarjana di bidang studi strategis, serta prinsip yang paling mendasar adalah prinsip menjunjung tinggi kebenaran dengan menegakkan *intellectual integrity, Academic Freedom and Academic Culture* dalam mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Prinsip-prinsip tersebut sangatlah relevan dikaitkan dengan tujuan dan

sasaran pendidikan. Targetnya, lahir pimpinan tingkat nasional dan warga Negara yang memiliki watak, moral, etika kebangsaan serta keunggulan kompetitif dari berbagai komponen bangsa yang terpilih dari unsur TNI, POLRI, PNS, Parpol, Ormas, Pengusaha, serta komponen bangsa lainnya guna menjamin keutuhan dan tegaknya NKRI.

Dalam upacara penutupan tersebut juga disampaikan piagam penghargaan Wibawa Seroja Nugraha kepada

- 1) Prof. DR. Irwan Abdullah
- 2) Prof. DR. Ibnu Hadjar M.ED
- 3) Kolonel Pnb Bonar H. Hutagaol

Sementara itu, penerima piagam penghargaan predikat andalan adalah:

- 1) Kolonel Inf Yoedhi Swastanto, M.BA
- 2) DR.dr. Fachmi Idris, M.Kes
- 3) Kolonel Laut (P) Karma Suta, SE
- 4) Prof. DR. Irwan Nugroho

Di akhir sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat kepada Alumnus PPRA XLV Lemhannas RI atas keberhasilannya menyelesaikan tugas belajar dengan baik, dan diharapkan menjadi dorongan semangat dan memberi ketauladanan dalam setiap gerak dan langkah sebagai pemimpin yang selalu peka dan peduli terhadap kelangsungan kehidupan sosial politik nasional, dan kepentingan nasional.



Peserta PPRA XLV yang meraih piagam penghargaan Wibawa Seroja Nugraha dan piagam penghargaan Predikat Andalan

PEMOTONGAN HEWAN KURBAN PADA IDUL ADHA TAHUN 1431 H

Lemhannas RI melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha tahun 1431 H pada tanggal 18 November 2010 yang dipimpin oleh Prof. DR. Muladi, S.H. di samping Masjid Sudirman Lemhannas RI. Tema Perayaan Idul Adha Tahun 1431 H di Lemhannas RI yaitu **“Dengan Idul Adha/Idul Kurban Kita Tingkatkan Kepedulian Sosial serta Berbagi Rasa terhadap Sesama”**

Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha bukanlah tradisi tanpa makna dan bukan juga seremonial sebatas “memotong” leher hewan kurban, tetapi lebih dari itu, mengandung nilai-nilai yang kaya akan makna, antara lain manifestasi ketakwaan kepada Allah SWT seperti kisah Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail, menghilangkan sifat *hubudd-nya* (cinta terhadap dunia) yang berlebihan, membuang sifat tamak/ serakah terhadap harta yang berlebihan serta menanamkan jiwa sosial/ berbagi dengan sesama.

Bila ditinjau lebih jauh Idul Adha atau hari raya kurban mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ritual transdental dimana ritual kurban ini sebagai wujud penghambaan manusia dalam ekspresi spiritual kepada Allah SWT serta dimensi sosial yang tercermin dari komponen pembagian hasil penyembelihan hewan kurban kepada fakir miskin yang sangat membutuhkannya.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H., di akhir sambutannya menghimbau kepada warga Lemhannas RI untuk memanfaatkan momentum guna mewujudkan kepedulian menyisihkan sebagian rizki yang dimiliki kepada saudara-saudara yang tidak mampu agar dapat meringankan beban hidup mereka dan sekaligus menjadikan masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih baik.



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memberikan sambutan sebelum penyembelihan hewan kurban



Hewan-hewan Kurban yang akan disembelih dalam rangka memperingati hari Raya Idul Adha Tahun 1431 H

Pengarah : DR. Ardi Partadinata, M.H., M.Si.

Penanggung Jawab : Kolonel Inf Irwan Kusnadi, M.Sc., **Redaktur :** Megawarni Simamora, S.E, M.M

Penyunting/Editor : Kolonel Laut (P) Estu Prabowo, Letkol Adm. Drs. M. Syahril, M.M., Mayor Inf. Risnal S.H., M.A.

Redaktur Pelaksana : Linda Purnamasari S.Sos., Endah Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S.

Desain Grafis & Fotografer : Arianto S.H., Sertu Syafrizal, Bambang Iman Aryanto, S.T.

Sekretariat : Gatot, Arief Ardiyanto, S.Sn.

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>